

GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA DUNIA KETIGA

Gili Argenti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Kapitalisme, liberalisme dan demokrasi dapat dikatakan sebagai pemenang dari perang dingin, sehingga saat ini hampir di penjuru dunia, ketiga sistem tersebut berhasil menghegemoni negara-negara dunia ketiga. Bahkan ketiga sistem ini bermetamorfosis menjadi Globalisasi, dengan mitos yang dijanjikan melalui mesin propaganda informasi dari dunia barat bahwa Globalisasi akan membawa kemajuan dan modernisasi dunia. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan yang menjelaskan dampak Globalisasi bagi bangsa-bangsa di dunia ketiga yang ternyata tidak seindah yang dipropagandakan dunia barat selama ini.

Kata kunci : Kapitalisme, Globalisasi dan Negara Dunia Ketiga.

Abstract

Capitalism, liberalism and democracy can be said to be the winners of the cold war, so that currently these three systems successfully hegemony third world countries. Even these three systems morphed into Globalization, with the promised myth through information propaganda from the western world, that Globalization will bring progress and modernization to the world. This paper is a literature study that explains the impact of globalization on nations in the third world which apparently are not as beautiful as those propagated by the western world so far.

Keyword : *Capitalism, Globalization, Third World Countries.*

Pendahuluan

Dalam salah satu bukunya Hasan Hanafi (2000), menjelaskan bahwa sejarah relasi antara dunia timur dan barat tidak berada dalam titik keseimbangan (*equilibrium*), dua kutub ini dalam narasi sejarahnya kerap berada pada posisi saling berkontradiksi bahkan saling menegasikan. Dunia barat senantiasa menempatkan dirinya sebagai peradaban superior umat manusia, mitos yang dibangun oleh mereka seakan menciptakan kesadaran yang dipaksakan terhadap dunia timur bahwa barat itu maju, modern, beradab serta identik dengan kemakmuran, sedangkan dunia timur berada pada kutub sebaliknya, mereka masih hidup dalam keterbelakangan, inferioritas, tradisional serta mencerminkan bangsa yang tidak beradab.

Menurut Dahlan (2000), kebijakan kolonialisasi yang ditempuh dunia barat atas dunia timur tidak terlepas dari mitos yang telah dibangunnya tersebut, bahwa untuk merubah wajah timur yang terbelakang menjadi sebuah dunia modern dan maju seperti barat, kolonialisme menjadi suatu keniscayaan sejarah yang tidak terbantahkan. Maka dimulailah proses "humanisasi" manusia-manusia timur oleh barat dengan mengirimkan ekspedisi-ekspedisi lintas samudra dengan membentangkan peta dan kompas sebagai arah petunjuk jalan menuju tanah-tanah yang tidak bertuan, ekspedisi yang dibekali dengan misi suci tersebut, selain membawa alat petunjuk jalan serta kebutuhan logistik selama perjalanan, juga disertai tentara-tentara yang dilengkapi dengan mesin-mesin pembunuh perang hasil dari modernisasi sebuah bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa maju dan beradab.

Seorang sastrawan Rusia Fyodor Dostoyevsky (dalam Dahlan, 2000) melukiskan proses kolonialisasi yang merupakan hasil pencurian kekayaan alam dunia timur telah merubah negeri-negeri barat menjadi semakin maju dan kaya,

bangunan-bangunan mewah banyak didirikan dengan bahan berteknologi tinggi, salah satunya sebuah Istana Kristal di *Hyde Park London* pada tahun 1862, bangunan historis yang didirikan dalam waktu 10 bulan ini, menurut Dostoyevsky dibangun dari bahan-bahan industri yang revolusioner, besi dan kaca, dua komponen bahan bangunan yang membutuhkan teknologi tinggi untuk menciptakannya.

Menurut Dahlan (2000), Istana Kristal menjadi kiasan tentang eksploitatifnya dunia barat ketika melakukan kolonialisasi terhadap dunia timur, kekayaan materil yang dimiliki dunia timur dikeruk habis-habisan dengan kekerasan bersenjata untuk sekedar membangun istana-istana megah para penguasa di barat. Jadi bila dunia barat maju sampai sekarang itu tidak bisa lepas dari hasil ratusan tahun mereka melakukan penjajahan. Sejarah kolonialisasi merupakan sejarah perampasan, sebuah narasi tentang perebutan serta penguasaan atas tanah, padi, emas dan marginalisasi masyarakat dunia timur. Proses kolonialisasi yang awalnya dijustifikasi untuk menciptakan pemerataan ilmu pengetahuan serta teknologi antara barat dan timur, ternyata berakhir dengan proses penindasan yang sangat berdarah dan kejam.

Menurut Frantz Fanon (dalam Dahlan, 2000:4) kekerasan yang dilakukan oleh kaum kolonial kemudian menuai resistensi dari kaum pribumi, mereka bangkit melawan bangsa-bangsa barat yang selama ini telah melakukan penjajahan atas tanah mereka, gerakan massif dekolonialisasi ini akhirnya mencapai kemenangan gemilang dengan mundurnya bangsa-bangsa barat kembali

ke negeri-negeri mereka. Pada medio abad ke-20 sejarah mencatat bahwa penjajahan dalam bentuk kolonialisasi secara fisik telah tumbang satu persatu, kemudian dari tanah bekas wilayah jajahan tersebut muncul serta terbentuklah negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika. Negara baru ini disebut sebagai negara dunia ketiga, negara yang baru merdeka pasca perang dunia kedua. Di negara-negara yang baru berdiri itu, para pemimpin dan masyarakatnya mempunyai mimpi besar tentang pentingnya pembangunan ekonomi politik di negara mereka, tentunya sebuah pembangunan yang akan mengejar ketertinggalan dari dunia barat yang telah lebih dulu melakukan modernisasi di segala bidang.

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah proses kolonialisasi benar-benar telah lenyap di muka bumi ini, sehingga setiap bangsa bisa dengan tenang melangsungkan kehidupannya, tanpa dihindangi rasa takut akan ancaman serta serangan dari negara lain yang lebih kuat. Menurut penulis dalam konteks saat ini, pertanyaan tersebut mudah sekali untuk dijawab, apabila kita melihat fenomena intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terdapat negara dunia ketiga khususnya negara-negara Islam (Irak, Afganistan dan Libya) menunjukkan bahwa kolonialisme tidak lenyap, bahkan menunjukkan wajah yang lebih beringas, kejam, tidak toleran dan mengindahkan kemanusiaan dalam mencapai tujuannya.

Kolonialisasi abad milinium ini tidak banyak mengalami perubahan, apabila kita membandingkannya dengan wajah kolonialisasi dahulu, wajah gelap kolonialisme tetap menggunakan invasi bersenjata dengan mengedepankan kekerasan fisik pada negara-negara yang mereka anggap melakukan pembangkangan, hanya perbedaannya kolonialisme dahulu menggunakan dalih memodernkan manusia-manusia timur, sedangkan kolonialisme abad ini menggunakan dalih ingin

mendemokratiskan negara-negara yang mereka klaim tidak demokratis dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan memaksakan sistem demokrasi kepada negara-negara non demokratis, mereka berargumen akan membebaskan warga masyarakat dinegara tersebut dari tindakan represif para penguasa.

Dalam Studi Oksidentalisme karya Hasan Hanafi (dalam Dahlan, 2000:20) dijelaskan bahwa kolonialisme dan imperialisme fisik tidak hanya terjadi di bidang militer saja, namun dilapangan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan proses ini telah cukup lama berlangsung. Fenomena globalisasi menjadi salah satu contoh kolonialisasi dibidang ekonomi yang saat ini mengancam eksistensi negara-negara bangsa di dunia.

Menurut Mansour Fakih (2002: 185-187) setelah dunia meninggalkan era kolonialisme fisik, dunia memasuki sebuah era baru yaitu "neokolonialisme", dimana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik saja, melainkan melalui hegemoni dan dominasi ekonomi.

Globalisasi yang merupakan sebuah mata rantai dari perkembangan ideologi kapitalisme, mengartikulasi kepentingan dominasinya dengan memberlakukan mekanisme perdagangan secara global, suatu mekanisme menciptakan kebijakan *free trade*, proses pengintergrasian ekonomi nasional suatu negara kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, dengan menyingkirkan campur tangan atau intervensi negara terhadap pasar, negara ditempatkan sebagai institusi yang harus netral dengan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme persaingan sempurna.

Menurut Stiglitz (2012:6) globalisasi telah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar, bahkan

memunculkan semakin banyak orang-orang di negara dunia ketiga menjadi semakin miskin yang hidup dengan kurang dari satu dolar sehari. Walaupun janji-janji pengurangan kemiskinan yang berulang-ulang telah dibuat selama satu dekade terakhir, jumlah orang yang sebenarnya hidup dalam kemiskinan telah meningkat hingga hampir 100 juta.

Dari narasi singkat diatas kita dapat menarik benang merah bahwa kolonialisme dunia barat ternyata tidak hancur seiring dengan kemerdekaan nasional di beberapa negara dikawasan Asia dan Afrika, bentuk kolonialisme baru berupa hegemoni di bidang ekonomi, pendidikan dan budaya semakin terasa dominasinya, tetapi bukan berarti kolonialisme dalam bentuk invasi militer sudah ditinggalkan sama sekali, penggulingkan Sadam Husein serta reziem Taliban di Irak dan Afganistan, terakhir campur tangan sekutu dalam krisis politik di Libya, membuktikan bahwa cara-cara kekerasan belum sepenuhnya ditinggalkan dunia barat ketika menghadapi ancaman-ancaman yang dianggap membahayakan kepentingannya.

Dengan adanya kemunculan fenomena neo kolonialisme, akhirnya menarik perhatian penulis untuk mengangkatnya dalam makalah ini, penulis ingin mengkaji dominasi neo kolonialisme pada bidang ekonomi dengan munculnya wacana globalisasi. Menurut penulis dengan melakukan analisa kritis terhadap globalisasi diharapkan kita bisa mengetahui dampak globalisasi secara objektif terhadap negara-negara dunia ketiga.

Untuk membatasi objek kajian dalam makalah ini, penulis membatasi neo kolonialisme hanya dalam bidang ekonomi terutama fenomena globalisasi, dengan adanya globalisasi penulis ingin mengetahui apa dampaknya terhadap negara-negara dunia ketiga (khususnya Indonesia)? Bagaimana seharusnya sikap negara-negara dunia ketiga (khususnya

Indonesia) terhadap globalisasi? Terahir apa korelasi globalisasi dengan kapitalisme dan ideologi liberalisme?

Metode

Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*literatur review*), studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah. Studi kepustakaan merupakan hal sangat penting, karena tidak ada suatu penelitian yang tidak melibatkan kajian kepustakaan.

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam tulisan ini, sebuah metode menganalisis data ditunjukkan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Menganalisis serta mengolah data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal dianggap penting oleh peneliti, dalam reduksi data membuat abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih sistematis dilakukan pada hal-hal yang penting.

Display Data

Display data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan hubungannya.

Kesimpulan data

Kesimpulan data merupakan upaya mencari makna, arti dan penjelasan dari data yang dikumpulkan dan telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah penting. Upaya ini dilakukan dengan mencari pola, tema, hubungan yang harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam membahas wacana globalisasi kerangka teoritik yang penulis gunakan menggunakan teori ekonomi politik, karena menganalisis globalisasi tidak bisa menggunakan satu disiplin keilmuan ilmu ekonomi atau ilmu politik secara terpisah, globalisasi merupakan sebuah fenomena yang membawa dampak keseluruhan aspek sosial kehidupan masyarakat, maka mengkaji globalisasi dengan pendekatan keilmuan yang bersifat intradisipliner menjadi suatu keniscayaan.

Menurut Yustika (2009), teori ekonomi politik ialah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh partisipasi di pasar bersedia berbagi informasi, inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa negosiasi. Negosiasi yang difasilitasi pemerintah tersebut secara substansi bukanlah regulasi melainkan aturan yang memaksa para pelaku ekonomi untuk berbagi informasi sehingga tercapai kesepakatan. Salah satu sumber kemajuan disiplin ekonomi politik saat ini berasal dari kegagalan teori ekonomi konvensional untuk memetakan dan mencari solusi persoalan-persoalan ekonomi.

Logde mendefinisikan (dalam Winarno, 2009:19) globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan

masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi boleh dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam suatu era dimana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global.

Sedangkan Amal (Wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi, Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta) globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologi dan lembaga-lembaga politik dunia.

Menurut Stiglitz (2007:54-55) awalnya globalisasi disambut dengan keceriaan, tetapi seiring berjalannya waktu, globalisasi memicu suatu kondisi yang timpang baik di negara maju maupun negara berkembang. Di satu sisi kemakmuran sedang digalakan, namun disisi lain masih terlalu banyak negara atau masyarakat tidak ikut merasakan.

Martin Khor (dalam Winarno, 2009:21-22) menyebutkan ada dua ciri utama dari globalisasi ; (1) Peningkatan konsentrasi monopoli berbagai sumber daya serta kekuatan-kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan dan dana global, (2) Globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi suatu pemerintahan dan masyarakat dalam

suatu wilayah negara bangsa bergeser menjadi dibawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan internasional. Istilah globalisasi telah menjadi konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer, memasuki milenium ketiga, dunia berubah dengan sangat cepat sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks, yaitu munculnya saling ketergantungan dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antar bangsa dan hubungan transnasional. Paham kesejahteraan dan kepemilikan bersama dinilai menghalangi pertumbuhan.

Sedangkan menurut Stiglitz (2007:56) terdapat beberapa masalah yang menjadi pusat perhatian terhadap globalisasi. (1) Aturan main globalisasi tidak adil, dirancang secara khusus untuk menguntungkan negara industri maju. (2) Globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan diatas nilai-nilai lain, seperti lingkungan hidup dan kehidupan itu sendiri. (3) Pengelolaan globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk kemampuan membuat keputusan-keputusan dibidang-bidang penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (4) Terdapat pemaksaan sistem ekonomi kepada negara-negara berkembang, bahkan dalam beberapa kasus telah merusak sistem ekonomi negara-negara berkembang tersebut.

Para ilmuwan sosial berbeda pendapat tentang sejarah munculnya globalisasi, meskipun fenomena globalisasi yang tampak kepermukaan terjadi pada tahun 1960-an, namun pada dasarnya terdapat banyak fakta yang menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi lokal ke ekonomi global telah terbentuk selama beberapa abad sebelumnya.

Menurut Winarno (2009:29-32), menjelaskan bahwa kedatangan kembali tim ekspedisi Magellan ke Spanyol pada tahun 1522 setelah beberapa tahun mengarungi samudra untuk menemukan

dunia baru, menjadi tonggak awal bangsa-bangsa barat menemukan cara untuk memasarkan dan mencari bahan baku produknya keseluruh dunia. Perkembangan ini berlanjut sampai tahun 1700 setelah negara-negara di Eropa Barat dan garis segitiga antara Jepang, Eropa dan Amerika Serikat berhasil mengakumulasi kekayaan serta kekuasaan tidak ada bandingannya.

Setelah Perang Dunia Kedua (PD II) akumulasi kapital khususnya negara Amerika Serikat mengalami puncaknya, sehingga banyak para ahli mempunyai keyakinan bahwa sebuah pergeseran yang besar tengah terjadi di dunia, pergeseran dari *state-dominated* ke arah *market-dominated*, mereka percaya mekanisme paling penting dalam menentukan ekonomi domestik maupun internasional ialah hubungan internasional.

Bagi Fakih (2002:185-187), kelahiran globalisasi dimotivasi oleh ideologi kapitalisme, sejarah perjalanan kapitalisme di akhir Abad 20 yang cenderung melamban dikarenakan adanya proteksi, paham keadilan, kesejahteraan rakyat, berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat dan sebagainya. Untuk itu kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapitalnya, maka strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak intelektual, penghapusan subsidi dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, maka sejak itu itulah gagasan globalisasi dimunculkan, dengan demikian menurutnya, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang kemudian dikenal sebagai Neo-Liberalisme.

Sedangkan Yustika (2009:72-73), menjelaskan dalam beberapa literatur munculnya konsep tentang globalisasi bermula dari disepakatinya *Bretton Woods* di New Hampshire pada Juli 1944, dalam konferensi tersebut secara umum dibentuk dua lembaga moneter dan keuangan internasional yang bertujuan membangun kembali Eropa akibat kemungkinan hancur leburnya wilayah itu akibat Perang Dunia Kedua serta sebagai bagian integral menyelamatkan dunia dari kehancuran ekonominya dimasa datang. Penciptaan dua lembaga keuangan Internasional IMF dan IBRD yang kemudian berubah nama menjadi Bank Dunia, menandakan bahwa semua aktivitas ekonomi global pasca pembentukan lembaga tersebut diandaikan dapat menyatu, dengan bahasa lain dapat dikatakan hubungan batas-batas negara telah sirna.

Fakta bahwa hubungan batas negara telah sirna tidak terlepas dari peran kedua lembaga ini dalam memberikan pinjaman dan menawarkan konsep pemulihan ekonomi, intinya dalam kesepakatan peminjaman dana tersebut, beberapa negara berkembang harus lebih membuka sistem ekonominya, supaya pada satu sisi aliran modal masuk menjadi determinan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional (Yustika,2009:72-73). Globalisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat pada awal 1990-an dengan Amerika Serikat yang didukung oleh beberapa negara maju sebagai motor penggerak utamanya, perkembangan ini kemudian memunculkan pemahaman bahwa globalisasi merupakan instrumen ekonomi-politik beberapa negara maju dalam rangka memapankan posisinya sebagai aktor utama perekonomian global.

Bagi negara-negara barat globalisasi merupakan tujuan untuk membangun tata dunia baru, dalam membangun tata dunia baru tersebut disepakatinya *The Neoliberal Washinton Consensus*, yang terdiri dari pembelaan

ekonomi privat dalam mendominasi ekonomi internasional (Fakih,2009:188).

Menurut Fakih (2009:190), terdapat sepuluh ajaran yang dilahirkan *The Neoliberal Washinton Consensus* yang mereka sebut sebagai paket reformasi ekonomi bagi negara-negara berkembang, ketentuan reformasi ekonomi yaitu kebijakan pasar bebas. Kesepuluh konsensus tersebut antara lain ; (1) disiplin fiskal, yang intinya memerangi defisit perdagangan, (2) *public expenditure* atau anggaran pengeluaran untuk publik, kebijakan ini berupa memprioritaskan anggaran belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi, (3) pembaharuan pajak, seringkali berupa pemberian keringanan bagi para pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak, (4) liberalisasi perdagangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar, (5) nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah, (6) *trade liberalisation barrier*, yakni kebijakan yang menyingkirkan segenap hal yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif, (7) *foreign direct investment*, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintahan yang menghambat pemasukan modal asing, (8) privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta, (9) deregulasi kompetisi dan (10) *intellectual property rights* atau hak paten intelektual.

Secara lebih spesifik, pokok-pokok pendirian globalisasi meliputi beberapa hal. *Pertama*, bebaskan perusahaan swasta

dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi dan harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA, SIJORI dan lain sebagainya. *Kedua*, hentikan subsidi negara kepada rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip neoliberalisme tentang jauhnya campur tangan pemerintah, juga bertentangan dengan prinsip dasar pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara kepada rakyat, dan itupun menghambat persaingan pasar bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi kesejahteraan bersama dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat tradisional (Fakih, 2009:190).

Sedangkan mekanisme kerja globalisasi, dengan mengadakan perjanjian perdagangan internasional yang dikenal dengan GATT. GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah, GATT juga merupakan forum negoisasi perdagangan antar pemerintah, serta juga pengadilan dimana terjadi perselisihan dagang antar bangsa supaya bisa diselesaikan.

Globalisasi pada dasarnya merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global, harapan pengintegrasian tersebut merupakan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional, karena pada dasarnya mereka yang akan diuntungkan dalam proses tersebut, selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad milenium, perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) meningkat jumlahnya. Merekalah yang akan mengeruk keuntungan sangat besar dari adanya kebijakan membuka pasar seluas-

luasnya tanpa ada batasan dari negara-negara bangsa.

Dari uraian di atas, dapat dikonstruksi konsep dan mekanisme globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia yang diperankan oleh tiga aktor utamanya: pertama, TNCs yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan olehnya mereka membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua, serta aktor ketiga adalah lembaga keuangan global/IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut selanjutnya selain menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *Intellectual Property Rights* (IPRs), dan kebijakan internasional lainnya, juga mendesak, mempengaruhi, ataupun memaksa negara-negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya demi memperlancar pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara memaksa mengubah semua aturan, kebijakan yang menghalangi ketiga aktor-aktor globalisasi, terutama TNCs untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar, maupun investasi. Dengan demikian, sesungguhnya globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara-negara Dunia Ketiga melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global.

Salah satu hasil *Washington Consensus* ialah menghapuskan subsidi bagi masyarakat karena dinilai tidak efektif dan efisien, salah satu kelompok yang terkena dampaknya ialah para petani

dinegara-negara dunia ketiga yang menghasilkan bahan pangan lokal, para petani tradisional tersebut harus berhadapan dengan pasar sangat kompetitif, mereka diharuskan bersaing dengan para pengusaha pertanian global yang berwujud perusahaan-perusahaan transnasional yang menghasilkan produk bahan pangan lebih murah dengan mutu sangat bagus, karena dari proses pembibitan sampai dengan pemanenannya dikerjakan dengan teknologi yang sudah tinggi. Studi FAO tentang dampak globalisasi terhadap 16 negara berkembang menyimpulkan hasil penelitiannya, bahwa ada trend yang menunjukkan konsentrasi monopoli dibidang pertanian di tangan TNCs-TNCs, sehingga mengakibatkan marginalisasi terhadap para petani kecil di negara dunia ketiga, dimana banyak petani yang tidak sanggup bersaing akan gulung tikar (mengalami kebangkrutan), sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran dan kematian di beberapa negara.

Fenomena ini terjadi karena dengan adanya kebijakan akses pasar bebas dan *domestic support*, beberapa TNCs dengan alasan persaingan global memaksa pemerintah-pemerintah yang menjadi pasien IMF dan Bank Dunia, untuk mengubah kebijakannya dari memberi subsidi kepada petani kecil menjadi subsidi kepada perusahaan-perusahaan agribisnis raksasa, mereka juga menekan pemerintah-pemerintah tersebut membebaskan biaya import hasil pertanian mereka, sehingga barang yang mereka pasarkan jauh lebih murah. Kebijakan ini akhirnya menggusur kemampuan para petani kecil sebagai produsen, akibatnya para petani kecil tidak mempunyai pilihan lain kecuali melepaskan sumber alam mereka terutama tanah dan sawah.

Penulis juga menemukan data bahwa pendapatan masyarakat dinegara-negara berkembang menurun drastis jika dibandingkan dengan pendapatan dinegara-negara maju pada era 1960-an

dan 1970-an. Ini berarti seiring dengan proses globalisasi memunculkan proses pemiskinan dan kesenjangan, masyarakat dinegara-negara maju menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat dinegara-negara dunia ketiga masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, fenomena ini tercermin dalam data yang dilaporkan oleh UNDP pada tahun 1992, menurut laporan ini diperkirakan bahwa 20% dari populasi dunia yang tinggal dinegara-negara miskin hanya memperoleh 82% dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya tinggal dinegara-negara termiskin hanya menerima 1,4%. Selanjutnya pada tahun 1989, rata-rata pendapatan dari 20% masyarakat yang hidup dinegara-negara paling kaya mencapai 60 kali lebih tinggi ketimbang 20% masyarakat yang hidup dinegara-negara termiskin. Rasio ini merupakan dua kali rasio tahun 1950, sebesar 30 kali. Selanjutnya, laporan *Human Development* pada tahun 1996 menunjukkan bahwa selama tiga dekade yang lalu, hanya 15 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi, sementara 89 negara lainnya mengalami kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi mereka (Yustika, 2009: 110-111). Meskipun data tersebut bukan data terbaru, tetapi setidaknya data itu menunjukkan kecenderungan yang negatif atau terbalik antara globalisasi dengan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tesis keum neoliberal, pada kenyataannya hanya negara-negara maju yang menikmati keuntungan dari globalisasi.

Disisi yang lain, hasil-hasil perundingan melalui berbagai putaran dalam GATT dan WTO ditenggarai

semakin menyulitkan posisi negara-negara miskin, mereka dipaksa untuk membuka seluas-luasnya wilayah mereka untuk investasi, sementara pada saat bersamaan perusahaan-perusahaan nasional mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai banyak keunggulan, baik dalam bidang teknologi, manajemen dan informasi. Akibatnya banyak perusahaan nasional dinegara-negara berkembang gulung tikar. Studi yang dilakukan oleh Petras dan Veltmeyer (dalam Yustika, 2009) di negara-negara Amerika Latin menyebutkan bahwa seiring dengan investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di wilayah tersebut melalui berbagai program privatisasi dan investasi bentuk lain, diikuti oleh kebangkrutan ribuan industri-industri lokal.

Di Indonesia konsekuensi sebagai negara yang pernah menjadi pasien lembaga donor IMF dan Bank Dunia, mengakibatkan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan neoliberalisme banyak ditempuh negara, bahkan sampai pemerintahan SBY saat ini, salah satu kebijakan yang terus diagendakan ialah privatisasi beberapa BUMN. Sejak kebijakan ini digulirkan dari tahun 2002, terlihat dari tahun ketahun jumlah BUMN semakin berkurang, hal ini mengindikasikan adanya proses privatisasi secara sistematis, sebelum tahun 1998 jumlah BUMN di Indonesia lebih dari 300 BUMN.

Pemerintah beralasan dengan melakukan privatisasi beberapa BUMN akan sedikit mengurangi beban pemerintah, sebab BUMN yang akan diprivatisasi merupakan BUMN yang bermasalah yang setiap tahunnya mengalami kerugian. Tapi menurut penulis alasan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya benar, karena justru BUMN-BUMN yang dijual ke swasta merupakan BUMN yang sehat dan mendatangkan profit tidak sedikit bagi negara.

Ironi globalisasi lainya menurut penulis, yaitu menyangkut sistem hak paten intelektual, awalnya dibuat dengan tujuan yang mulia untuk memberikan apresiasi tentang kreatifitas dan kecerdasan manusia, pada prakteknya dijadikan alat oleh perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh profit dari hasil intelektual yang dipatenkan. Terkadang hak paten tersebut merupakan pencurian atas hak kreatifitas orang lain yang berasal dari negara-negara berkembang, karena orang-orang di negara berkembang tidak mempunyai kapital yang besar untuk mendaftarkan hasil karya leluhur mereka, maka hanya perusahaan-perusahaan besarlah yang memiliki kemampuan mempatenkanya, untuk kemudian melakukan klaim secara sepihak. Dari hasil analisa dalam makalah ini penulis membangun konstruksi kesimpulan bahwa globalisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap arah pembangunan politik ekonomi bagi negara-negara dunia ketiga, dampak positif dari globalisasi sangatlah kecil dirasakan oleh negara-negara pinggiran tersebut, yang merasakan keuntungan paling besar tentunya negara-negara maju yang memiliki sumber kapital dan teknologi yang sangat tinggi.

Simpulan dan Saran

Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith.

Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan *developmentalism* sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah mencurigainya sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme gaya baru, setelah era kolonialisme kuno mengalami resistensi dari masyarakat pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal ,Ichlasul, *Globalisasi, Demokrasi dan Wawasan Nusantara : Prespektif Pembangunan Jangka Panjang*, dalam wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi, Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta. (Diakses, tanggal 2 November 2018, [etd.repository.ugm.ac.id/download file/103526/.../S2-2016-376525-bibliography.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/download/file/103526/.../S2-2016-376525-bibliography.pdf))
- Dahlan, Muhidin M (editor) (2001). *Post Kolonialisme : Sikap Kita Terhadap Barat*. Yogyakarta : Jendela.
- Fakih, Mansour.(2002). *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta : Insist Press.
- Hanafi, Hasan. (2000) *Oksidentalisme Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*. Jakarta : Paramadina.
- Stiglitz, Joseph E (2007) *Making Globalization Work : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Bandung : Mizan.
- Stiglitz, Joseph E (2012). *Kegagalan Globalisasi Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Nasional*. Jakarta : PT. Ina Publikatama.
- Winarno, Budi (2009). *Pertarungan Negara VS Pasar*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yustika, Ahmad Erani (2009). *Ekonomi Politik : Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Profil Singkat

Gili Argenti, dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang sejak tahun 2009 sampai sekarang. Menamatkan S1 Ilmu Pemerintahan (Konsentrasi Politik) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 Ilmu Politik (Konsentrasi Politik Indonesia) Univeristas Nasionalis Jakarta. Selain mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan disiplin ilmu politik, penulis sangat kosen mengkaji Gerakan Sosial, Islam Politik, Partai Politik dan *Civil Society*.